

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI DALAM  
TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMILU  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 30/Pid.Sus/2019/PN-Pml)**

Oleh

Rezza Fauziyah

E1A015171

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang mana tercantum didalam dasar negara indonesia yaitu Pancasila sila ke empat. Salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum atau disingkat pemilu yang mana merupakan suatu sarana yang tersedia bagi rakyat Indonesia untuk menjalankan kedaulatannya sebagai warga Indonesia untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya tanpa adanya paksaan atau ancaman. Untuk menjalankan dan melindungi jalannya salah satu pilar penting demokrasi di Indonesia yaitu pemilu dari perbuatan perbuatan yang dapat merusak jalannya pemilu maka dibuatlah undang undang khusus yang mengatur mengenai pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak menjamin suatu pemilihan umum bebas dari kecurangan atau perbuatan perbuatan yang mencoreng arti dari demokrasi seperti didalam putusan pengadilan negeri pematang Nomor: 30/Pid.Sus/2019/PN Pml. Dalam penelitian saya rumusan masalahnya adalah 1. Apakah pertimbangan hukum hakim terhadap alat bukti sesuai dengan prinsip pembuktian?, 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap terpidana dalam putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2019/PN Pml?. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative dan analisis data menggunakan normative kualitatif dengan tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah pertimbangan hakim sudah benar dan melihat akibat hukum terhadap terdakwa.

Kata Kunci : Demokrasi, Pemilu, pertimbangan hakim, akibat hukum, prinsip pembuktian

**LEGAL CONSIDERATIONS OF EVIDENCE TOOLS IN CRIMINAL  
ACTS OF ELECTION VIOLATION**

**(Study of Pemalang District Court Decision Number: 30 / Pid.Sus / 2019 /  
PN-Pml)**

By

E1A015171

**ABSTRACT**

*Indonesia is a country that adheres to a democratic system which is listed in the foundation of the Indonesian state, namely the fourth Pancasila precepts. One of the important pillars in the democratic system in Indonesia is the general election or abbreviated election which is a means available for the Indonesian people to exercise their sovereignty as Indonesian citizens to elect a leader according to their choice without coercion or threat. To carry out and protect the running of one of the important pillars of democracy in Indonesia, namely elections from acts that can damage the course of elections, a special law that regulates elections is made, namely Law Number 7 of 2017 concerning General Elections But the existence of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections does not guarantee that a general election is free from fraud or acts that tarnish the meaning of democracy as in the Pemalang district court decision Number: 30 / Pid.Sus / 2019 / PN Pml. In my research, the formulation of the problem is 1. What is the judge's legal consideration of evidence in accordance with the principle of proof? 2. How is the legal consequence of the convict in decision Number: 30 / Pid.Sus / 2019 / PN Pml ?. The method I use in this research is a normative juridical approach and data analysis using qualitative normative with the aim of this research is to find out whether the judge's consideration is correct and see the legal consequences for the defendant.*

*Keywords: Democracy, General Election, Judge's Consideration, Legal Consequences, Evidence Principles*